SKRIPSI

MULTI TRACK DIPLOMACY SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND DAN KAMBOJA DI WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh:

VIVELLA DESHAFIA H.K

E1112201013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

MULTI TRACK DIPLOMACY SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND DAN KAMBOJA DI WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh:

VIVELLA DESHAFIA H.K

NIM. E1112201013

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

***MULTI TRACK DIPLOMACY* SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA DI WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR**

Tanggung Jawab Yuridis pada:

VIVELLA DESHAFIA H.K

NIM. E1112201013

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ori Fahriansyah. S.IP, M.Si

NIP. 196911222002121002

Tanggal 10/05/2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Dewi Suratiningsih. S.IP, MA

NIP. 198609142019032005

Tanggal 11 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN TIM SIDANG

***MULTI TRACK DIPLOMACY* SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND DAN KAMBOJA DI WILAYAH KUIL PREAH VIHEAR**

Oleh:

VIVELLA DESHAFIA H.K

E1112201013

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 30 Juli 2025
Waktu	: 13.00 – 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si	Dewi Suratiningsih, S.IP., MA
NIP. 196911222002121002	NIP. 198609142019032005
Dosen Penguji Utama	**Dosen Penguji Pendamping**
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si	Laras Putri Olifiani, S.IP, M.HI
NIP. 197408102002122002	NIP. 199204232019032013

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si

NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan dilatarbelakangi oleh konflik perbatasan sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Sengketa perbatasan ini terjadi karena hak batas dari Kuil Preah Vihear antar kedua negara tersebut dan adanya klaim dari negara Kamboja sebagai pihak yang mengklaim Kuil Preah Vihear sebagai bagian dari negara Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian konflik sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Penelitian ini menggunakan Konsep Perbatasan dan Teori *Multi Track Diplomacy*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari sumber yang relevan melalui sarana digital untuk menggambarkan fokus penelitian pada *multi track diplomacy* sebagai instrumen yang dilakukan antara Thailand dan Kamboja dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear. Hasil dari penelitian ini adalah upaya dari pemerintah Thailand dan Kamboja dalam menangani konflik, keterlibatan Mahkamah Internasional, upaya Thailand dan Kamboja dengan program yang dibuat sebagai upaya bisnis dari penyelesaian konflik yaitu (Promosi paket pariwisata, Penerapan visa tunggal), upaya *private citizen*, upaya akademisi dan peneliti dengan Program pertukaran pelajar bagi mahasiswa/i D3 pariwisata. Upaya *Activism*, upaya *Religious* (agama), upaya *Funding* (Pendanaan), upaya *Public Opinion* (Media) dalam penyelesaian konflik sengketa Kuil Preah Vihear.

Kata kunci: *Activism*, Akademisi dan Peneliti, Bisnis Pariwisata, *Funding* (Pendanaan), *Multi Track Diplomacy*, Mahkamah Internasional, Pemerintah, *Private Citizen, Public Opinion* (Media), *Religious* (Agama), Thailand dan Kamboja.

ABSTRACT

This study describes and is motivated by the border conflict and territorial dispute between Thailand and Cambodia. The dispute arose over the sovereignty of the Preah Vihear Temple, with Cambodia claiming the temple as part of its territory. The purpose of this research is to explain the resolution of the border conflict between Thailand and Cambodia. The study applies the Concept of Borders and the Theory of Multi-Track Diplomacy, using a qualitative method. Data were collected through library research from relevant digital sources, focusing on multi-track diplomacy as the instrument utilized by Thailand and Cambodia in resolving the Preah Vihear Temple dispute. The findings showed that efforts were undertaken by the governments of Thailand and Cambodia, including the involvement of the International Court of Justice (ICJ) and joint initiatives such as tourism promotion packages and the implementation of a single visa scheme. Other tracks included the role of private citizens, academics and researchers through student exchange programs for tourism diploma students, activism, religious approaches, funding initiatives, and public opinion through the media where all contributed to conflict resolution in the Preah Vihear dispute.

Keywords: Activism, Academics and Researchers, Tourism Business, Funding, Multi-Track Diplomacy, International Court of Justice, Government, Private Citizens, Public Opinion, Religion, Thailand, Cambodia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul "*Multi Track Diplomacy* Sebagai Instrumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand dan Kamboja di Wilayah Kuil Preah Vihear". Penelitian ini secara mendalam mengkaji peran *multi track diplomacy* sebagai instrumen dalam penyelesaian sengekta perbatasan yang berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja, khususnya terkait kepemilikan Kuil Preah Vihear. Konflik ini berakar pada interpretasi historis dan geografis yang berbeda telah menjadi cerminan kompleksitas geopolitik regional yang melibatkan aspek kedaulatan, identitas nasional, dan kepentingan ekonomi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana cara negara Thailand dan Kamboja dalam menjalin kembali hubungan antar kedua negara tersebut melalui *Multi Track Diplomacy* melalui tiga indikator dari sembilan indikator *multi track diplomacy* yaitu (1) Pemerintah (*government*), (2) Professional non pemerintah (*professional conflict resolution*), (3) Bisnis (*business*), (4) *Private Citizen*, (5) Akademisi dan Peneliti, (6) *Activism*, (7) *Religious* (Keagamaan), (8) *Funding* (Pendanaan), (9) *Public Opinion/Communication* (Media)

Penelitian ini berfokus pada cara pengupayaan yang dilakukan Thailand dan Kamboja dalam menjalin kembali hubungan antar kedua negara tersebut setelah adanya konflik sengketa pada tahun 2017-2024 dengan melalui *multi track diplomacy* sebagai penyelesaian konflik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang mengumpulkan data melalui buku, dokumen resmi negara, jurnal, artikel ilmiah, atau bahan bacaan yang menyajikan berita

internasional dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada penulis dalam memahami masalah melalui data yang meliputi proses dan makna. Dari data yang diperoleh demikian bisa menjelaskan pengaruh suatu fenomena.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pembahasan berupa penjelasan dari masing-masing indikator *multi track diplomacy*. Mulai dari peran pemerintah yang mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 tentang Kerjasama Pariwisata antara Thailand dan Kamboja yang diadakan di Bangkok, Thailand, tanggal 17 hingga 18 Juli 2024, memutuskan lima kerjasama terssebut meliputi "*Two Kingdoms, One Destination*", pengembangan sumber daya manusia, promosi pariwisata berkualitas, promosi investasi pariwisata, dan peningkatan fasilitas lintas batas. Kemudian, dalam peran professional non pemerintah (aktor non-negara), Mahkamah Internasional berfungsi sebagai lembaga hukum yang memberikan keputusan dan mengikat berdasarkan hukum internasional dengan mendapatkan keadilan. Keterlibatan Mahkamah Internasional mencerminkan *track two diplomacy* dalam kerangka *multi track diplomacy*, dimana aktor non-negara dan lembaga hukum internasional berupaya menciptakan perdamaian melalui jalur informal dan formal. Dalam bisnis pariwisata muncul sebagai instrumen strategis yang efektif dalam proses ini, mempresentasikan *track three diplomacy* (diplomasi bisnis). Adapun upaya yang dilakukan yaitu (1) Promosi Paket Pariwisata, (2) Penerapan Visa Tunggal (Single Visa). *Private citizen*, masyarakat sipil berperan melalui advokasi deeskalasi dan aksi kemanusiaan berbasis komunitas menggambarkan *track four diplomacy* menjadi aktor non-negara yang memperkuat perdamaian dari akar rumput.

Dalam akademisi dan peneliti dilakukannya dengan Program Pertukaran Pelajar D3 Pariwisata menggambarkan *track five diplomacy* pendidikan berperan strategis sebagai agen perdamaian regional. Aktivis berperan melalui kampanye warisan budaya dan LSM advokasi lintas isu dalam membangun kepercayaan dan jaringan sosial mencerminkan upaya dari *track six diplomacy*. Pemuka agama berperan melalui ritual doa dan penghormatan korban perang, agama menjadi fondasi yang menumbuhkan narasi perdamaian dan kepercayaan antar kedua negara sesuai dengan *track seven diplomacy*. Upaya *funding* (pendanaan) mobilisasi dana internasional dan regional, pendanaan tidak hanya menyediakan sumber daya material, tetapi juga menjadi instrument kolaborasi lintas negara dalam *track eight diplomacy*. Terkahir, *public opinion/communication* (media) berfungsi sebagai penyalur komunikasi, pengarah persepsi, dan penguat legitimasi penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan *track nine diplomacy*.

Keberhasilan *multi track diplomacy* dalam meredakan ketegangan dan memulihkan hubungan Thailand dan Kamboja menunjukkan menjadi jembatan efektif untuk diplomasi kultural dan politik. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan perekonomian kedua negara, tetapi juga memperkuat stabilitas regional dan kepercayaan antar masyarakat. Penulis berharap untuk berkelanjutan disarankan agar pemerintah Thailand dan Kamboja terus memperluas kerjasama pariwisata, melibatkan lebih banyak sektor swasta dan publik.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivella Deshafia H.K

Nomor Induk Mahasiswa : E1112201013

Program Studi / Angkatan : Ilmu Hubungan Internasional / 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Vivella Deshafia H.K

NIM: E1112201013

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO PERSEMBAHAN

Motto:

"Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu"

-R.A Kartini-

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih, melalui kerendahan hati penulis ini dipersembahkan kepada:

1. Orang Tua. Dengan ini Vivella persembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada mama saya Evy Herawati SE yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya hingga dapat mencapai titik ini. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Maafkan penulis jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala.
2. Saudara saya, Kartika Anggita H.K, SE, dan Fredy Oktara W.D, S.H kakak dan abang saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama saya menjalani perkuliahan ini dan skripsi ini.

3. Pacar saya, Reja, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Penulis terimakasih atas waktu hampir setiap hari menemankan saya dikala sibuknya kerja dan kehidupan sehari-hari. Terimakasih selalu support saya dalam penulisan skripsi ini dan juga dalam segala hal, terimakasih sudah ada untuk saya.
4. Serta teman-teman saya, Audilla Nurmauliza, Diva Aurelia, Lidia Anggraeni, Kanita Sabilla P.Z, Rahmania, Valentira Febrita Narwanti, teman seperjuangan saya yang juga banyak memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, yang juga setia mendengar curhatan hati penulis, dan semoga kami semua lulus bersamaan di tahun depan aamiin.
5. Mahasiswa/(i) Hubungan Internasional Angkatan 2020 dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan ini.
6. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri, Vivella Deshafia H.K, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih kerjasamanya untuk terus semangat menjalani semua tahapan perkuliahan yang tidak mudah ini. *I wanna thank me for just being me at all times*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Multi Track Diplomacy* Sebagai Instrumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand Dan Kamboja Di Wilayah Kuil Preah Vihear". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 (S1) pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada skripsi ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan selanjutnya agar lebih baik lagi.

Peneliti menyadari, dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dalam banyak hal. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menghaturkan rasa terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Ketua Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAPK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya selama penulisan skripsi saya.
6. Dewi Suratiningsih, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan, saran, dan dukungan yang telah diberikan.
7. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si selaku Dosen Pembahas Utama saya pada Seminar Proposal Penelitian saya.
8. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji Utama saya.
9. Laras Putri Olifiani, S.IP, M.HI selaku Dosen Penguji Pendamping saya.
10. Ully Nuzulian, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
11. Wakil Dekan, pihak Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

12. Kepada mama saya, abang, dan kakak saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang telah disebutkan karena kebaikan dan kebijakan yang telah berkontribusi dalam pengerjaan proposal penelitian maka penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. Semoga kebaikan dan jasa mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, semoga proposal penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Pontianak, 11 Juli 2025

Vivella Deshafia H.K

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM SIDANG iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RINGKASAN SKRIPSI vii
PERNYATAAN KEASLIAN x
MOTTO PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA 14
2.1 Definisi Konsep 14
2.1.1 Sengketa Perbatasan 14
2.2 Teori 15
2.2.1 *Multi Track Diplomacy* 15

2.3 Hasil Penelitian Relevan 23
2.4 Alur Pikir Penelitian..... 28
2.5 Pertanyaan Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-langkah Penelitian 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 33
3.4 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Instrumen/ Alat Pengumpulan Data..... 36
3.7 Analisis Data..... 37
3.7.1 Keabsahan Data..... 37
3.7.2 Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM..... 41
4.1 Latar belakang Negara Thailand dan Kamboja 41
4.2 Diplomasi Pariwisata "*Two Kingdoms, One Destination*" dalam penyelesaian konflik sengketa. 47
4.3. Gambaran perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja..... 54
4.4 Konflik Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja 55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 63
5.1 Upaya Pemerintah Thailand dan Kamboja dalam menangani konflik sengketa. 63
5.2 Upaya Aktor Non-Negara (Mahkamah Internasional) dalam menangani sengketa Thailand dan Kamboja..... 69
5.2.1 Mahkamah Internasional 69

5.3 Upaya Bisnis Pariwisata Thailand – Kamboja: Strategi kerjasama untuk menyelesaikan konflik 78
5.3.1. Promosi Paket Pariwisata Terpadu..... 79
5.3.2 Penerapan Visa Tunggal (Single Visa) 83
5.4 Upaya *Private Citizen* dalam penyelesaian konflik Thailand – Kamboja 87
5.5 Upaya Para Akademisi dan Peneliti dalam penyelesaikan konflik sengketa Thailand – Kamboja 88
5.5.1 Program Pertukaran Pelajar D3 Pariwisata..... 88
5.6 Upaya *Activism* (Aktivis) dalam penyelesaian konflik sengketa..... 92
5.7 Upaya *Religious* (Keagamaan) dalam penyelesaian konflik sengketa .. 94
5.8 Upaya *Funding* (Penyedia dana) dalam penyelesaian konflik sengketa. 96
5.9 Upaya *Public Opinion/Comunication* (Media) dalam penyelesaian konflik sengketa. 98
BAB VI PENUTUP 101
6.1 Kesimpulan..... 101
6.2 Saran..... 104
6.3 Keterbatasan Penelitian 106
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN 115

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

Tabel 1.1 Perbedaan Kepentingan Thailand dan Kamboja 5

Tabel 2.1 Alur Pikir Penelitian 30

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 35

Tabel 4.1 Sistem Pemerintahan Thailand 41

Tabel 4.2 Upaya kerjasama Thailand – Kamboja 2017-2024.....47

Tabel 4.3 Rentang waktu terjadinya konflik sengketa Thailand – Kamboja 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

Gambar 1.1 Peta Negara Thailand dan Kamboja 2

Gambar 2.1 *The Nine Tracks of Multi-Track Diplomacy* 18

Gambar 4.1 Bendera Negara Thailand 41

Gambar 4.2 Bendera Negara Kamboja 44

Gambar 4.3 Wilayah Perbatasan Thailand dan Kamboja 51

Gambar 5.1 Pertemuan Tingkat Menteri Ke-3 Tentang Kerjasama Pariwisata Thailand dan Kamboja 62

BAB I
PENDAHULUAN

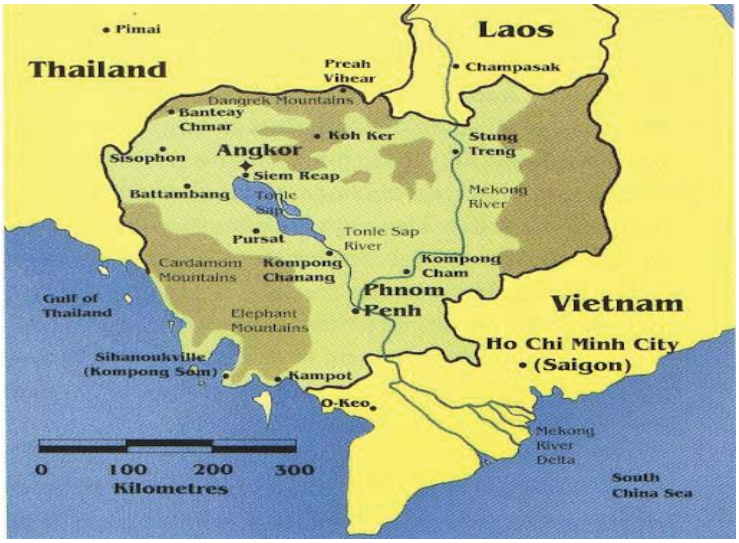
1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik dan masalah adalah suatu hal yang lumrah dalam hubungan internasional. Di antara konflik internasional lainnya, konflik mengenai wilayah dan perbatasan adalah konflik yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan integritas dan kedaulatan negara. Terjadinya suatu konflik atau permasalahan ini biasanya karena perbedaan pandangan atau pendapat serta kepentingan yang ada dari masing-masing pihak yang berkonflik. Konflik tersebut salah satunya mengenai sengketa Kuil Preah Vihear yang berada diperbatasan kedua Negara yaitu Thailand dan Kamboja.

Kuil preah vihear memiliki nilai historis dan keagamaan yang besar bagi Kamboja, sehingga menjadi simbol kedaulatan nasional bagi Negara tersebut. Adanya penentuan batas wilayah di sekitar kuil juga menjadi sangat sensitif secara politik di kedua Negara karena isu Preah Vihear sering digunakan oleh politikus untuk membangkitkan sentimen nasionalisme, terutama dalam situasi politik yang tidak stabil, yang mendorong upaya untuk mempertahankan klaim terhadap wilayah tersebut. Konflik ini juga dapat dilihat sebagai argumen tentang adanya hak perbatasan suatu pihak (Nurfadhilah, 2017:2). Terjadinya batas wilayah yang diperebutkan antara Thailand dan Kamboja yaitu adalah wilayah Kuil Preah Vihear yang merupakan awal terjadinya konflik antar kedua Negara ini dimulai.

Thailand dan Kamboja adalah dua Negara yang berada di Negara Asia-Tenggara. Thailand berada di sebelah utara hingga barat Kamboja jika dilihat pada peta Asia Tenggara, sedangkan Kamboja berada di sebelah selatan Thailand. Di perbatasan antara kedua Negara ini terdapat sebuah gunung, gunung yang dimaksud adalah gunung Dongrek yang menghadap ke dataran Kamboja, dan di atasnya terdapat komplek candi atau kuil yang dikenal dengan nama Kuil Preah Vihear, yang dibangun oleh seorang Raja Khmer (Kamboja) pada abad ke-11 (Chandara, 2016:17). Letak lokasinya yang tinggi, Kuil Preah Vihear memiliki akses yang penting terhadap aktivitas militer yang dapat memberikan keunggulan strategis untuk pengawasan dan kontrol wilayah di sekitarnya dalam hal keamanan. Gunung ini menandai perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Gambar 1.1: Peta Negara Thailand dan Kamboja



Sumber: http://www.worldmapfinder.com/Id/Asia/Cambodia/

Dalam hal ini, pemerintah Thailand dan Kamboja sangat sulit untuk menentukan bagian wilayah mana dari Kuil Preah Vihear tersebut dan sekitarnya yang merupakan wilayah kedaulatan mereka, karena kuil ini dijadikan sebagai tempat suci untuk melaksanakan ibadah oleh masyarakat setempat, khususnya penduduk atau warga Thailand dan Kamboja yang beragama Hindu-Budhha. Ketika penjajah Perancis menarik diri dari Kamboja pada masa pemerintahan kolonial Perancis yang berlangsung dari tahun 1863 hingga 1953, Thailand pertama kali mempersengketakan Kuil Preah Vihear pada tahun 1954 (Chandara, 2016:18). Oleh karena itu, Thailand memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguasai Kuil Preah Vihear dan sekitarnya dengan berbagai strategi, yaitu salah satunya dengan mengirimkan pasukan militer untuk menduduki kawasan sekitar candi atau kuil, berdasarkan peta tahun 1904 yang menempatkan Kuil Preah Vihear di dalam wilayahnya.

Pemerintah Kamboja saat mengetahui hal tersebut mengenai Thailand mengirimkan pasukan militernya untuk menduduki wilayah kuil menilai tindakan dari Thailand itu merupakan pelanggaran kedaulatannya dikarenakan tidak ada kesepakatan mengenai hak kepemilikan kuil yang sebenarnya. Alhasil, demi menyelesaikan hak kepemillikan kuil ini, pemerintah Kamboja membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional atau dikenal dengan *International Court of Justice* (ICJ). Kepemilikan Kuil Preah Vihear milik Kamboja dikeluarkan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962 mengenai hak kepemilikan kuil tersebut. Setelah Kamboja memperoleh hak kepemilikan atas Kuil Preah Vihear, pemerintah Kamboja mengusulkan kepada

United National Education Scientific and Culture Organization (UNESCO) agar bangunan kuil yang berusia 900 tahun tersebut ditetapkan sebagai situs warisan dunia milik Kamboja (Chandara, 2016:20). Tujuan dari usulan Kamboja adalah untuk kuil tersebut dapat dilindungi oleh UNESCO dan negara lain. Pada tanggal 7 Juli 2008, Kuil Preah Vihear dijadikan situs warisan dunia milik Kamboja.

Setelah mengetahui hal tersebut mengenai Kuil Preah Vihear yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan milik Kamboja, Negara Thailand menolak dan tetap mengklaim Negaranya sebagai pemilik kuil itu karena beberapa faktor, antara lain masyarakat Thailand yang selalu melakukan ibadah di kuil tersebut, dan wisatawan yang mengunjungi Kuil Preah Vihear melalui Negara Thailand, bukan melalui Negara Kamboja. Secara khusus, kuil ini juga menarik wisatawan dari berbagai dunia karena keindahan arsitektur Khmer yang kuno dan lokasi di atas tebing Dongrek memberikan pemandangan yang indah dari dataran dibawahnya (Ali, 2014). Dari wisatawan yang berkunjung tidak hanya memberikan pendapatan biaya dan layanan wisata, tetapi juga mendukung ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa seperti, akomodasi, makanan, dan transportasi (Ali, 2014). Artinya, Thailand dan Kamboja merebut Kuil Preah Vihear dan kawasan sekitarnya juga ketergantungan pada devisa dari pariwisata, juga mereka ingin menggunakan kuil tersebut sebagai nilai jual untuk meningkatkan perekonomian negara mereka masing-masing. Dan akibat dari penolakan terhadap keputusan UNESCO, hubungan Thailand dan Kamboja menjadi tegang pada tahun 2008 hingga 2011.

Dalam konflik Kuil Preah Vihear ini, bagi Thailand dan Kamboja kuil ini memiliki kepentingan tersendiri bagi kedua negara tersebut dalam hal sejarah, politik, ekonomi, pariwisata, keamanan, dan lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai kepentingan Kuil Preah Vihear bagi Thailand dan Kamboja.

Tabel 1.1 Perbedaan kepentingan Thailand dan Kamboja

Kepentingan	Thailand	Kamboja
Politik	Isu nasionalisme yang digunakan untuk meraih dukungan politik	Pengakuan internasional melalui putusan Mahkamah Internasional memperkuat posisi politik nasional
Ekonomi dan Pariwisata	Kuil ini menarik wisatawan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi	Kuil Preah Vihear adalah salah satu destinasi utama Kamboja yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal dan nasional.
Keamanan	Posisi strategis untuk keamanan nasional	Mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel ini menggambarkan bagaimana kepentingan masing-masing Negara terhadap Kuil Preah Vihear berbeda. Kepentingan kedua Negara terhadap Kuil Preah Vihear sering kali menyebabkan ketegangan, tetapi juga mencerminkan betapa pentingnya kuil ini bagi identitas nasional dan kedaulatan masing-masing Negara.

Konflik mengenai Kuil Preah Vihear telah berkembang menjadi halangan politik domestik antar kedua Negara. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas tahun 2008 tidak terlalu berdampak yang signifikan bagi kedua negara, terutama secara ekonomi. Bagi Thailand, rendahnya

nilai ekspor Thailand ke Kamboja yang tidak lebih dari 1% dari total ekspor Thailand tidak akan mempengaruhi perekonomian apalagi GDP Thailand. Akan tetapi, perdagangan lintas batas antara kedua Negara dan pariwisata yang lebih merasakan dampaknya (Nurfadhilah, 2017:9). Sengketa ini juga mengakibatkan dibatalkannya *Memorendum of Understanding* (MoU) antara Thailand dengan Kamboja untuk eksplorasi minyak bersama di Teluk Thailand yang telah dibuat oleh kedua Negara. Selain itu, akibat dari sengketa ini perdagangan, budaya dan *exchange student* dibatasi oleh kedua Negara mulai dari tahun 2011-2013 (Nurfadhilah, 2017:9).

Pemerintah Kamboja mengajukan permintaan bantuan kepada organisasi internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena dinilai kekuatan organisasi atau lembaga tersebut akan berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik. Setelah menerima laporan situasi konflik yang sedang terjadi dari pihak kamboja, Dewan Keamanan (DK) PBB menunjuk *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai pihak ketiga untuk menangani situasi konflik tersebut (Chandara, 2016:22). Thailand pada mulanya menolak keputusan atau pilihan tersebut dan tetap keras pada penyelesaian konflik secara bilateral, namun Menteri Luar Negeri Thailand akhirnya menyetujui dengan keputusan Dewan Keamanan PBB. Melalui ASEAN, Thailand sepakat atau setuju untuk menyelesaikan konflik.

ASEAN adalah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang damai dengan adanya *Treaty of Amity and Cooperation in Southest Asean Nations* (TAC) yang ditandatangani pada

ASEAN Summit pertama di Bali pada tahun 1976. Oleh karena itu, PBB mempercayai ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik antara Negara anggotanya serta untuk mempertahankan perdamaian ini.

Konflik Kuil Preah Vihear mungkin mencapai puncaknya pada tahun 2011 ketika Indonesia menjabat atau berperan sebagai ketua ASEAN. Dalam konflik ini, Indonesia akan berusaha menjaga perdamaian di Asia Tenggara sebagai dari ketua ASEAN. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN merespon secara proaktif terhadap perubahan situasi atau kondisi keamanan yang mempengaruhi kesejahteraan atau keamanan anggotanya, dan disini Indonesia akan bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Indonesia melakukan *shuttle diplomacy* (Diplomasi Ulang-Alik) untuk mendapat kesepakatan dari Thailand dan Kamboja bahwa permasalahan ini akan diselesaikan melalui ASEAN (Fadhillah, 2020).

Kemudian Indonesia menawarkan penyelesaian konflik melalui jalan politik karena tidak ingin mengintervensi pihak mana pun atau menggunakan kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Marty Natalegawa mengadakan forum pertemuan antar tiga menteri luar negeri, yaitu Thailand, Kamboja, dan Indonesia di Bogor tahun 2011. Dalam pertemuan tersebut Menlu RI menggunakan dialog perundingan bersama mencari solusi penyelesaian konflik. Indonesia juga meminta persetujuan kepada Thailand dan Kamboja terkait penurunan tim observer ke daerah bersengketa agar dapat melihat langsung situasi dan kondisi di tempat konflik. Tim observer ini akan dijadikan sebagai pihak netral menjaga keamanan daerah perbatasan.

Melalui segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN demi menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja mengenai perebutan Kuil Preah Vihear di akhir masa jabatannya, dikatakan belum berhasil menyelesaikan konflik. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam menduduki posisi ketua ASEAN, tetapi Indonesia juga siap untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan ASEAN di tingkat para pejabat negara, menteri luar negeri, dan kepala negara.

Mengingat masalah ini masih terus berlanjut, kedua pihak yang berkonflik, Thailand dan Kamboja telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahannya baik melalui penyelesaian bilateral, ASEAN, PBB, dan Mahkamah Internasional. Pada awalnya, kedua Negara berusaha menyelesaikan konflik melalui upaya bilateral, namun mereka tidak mampu melakukannya dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, dalam upaya mengakhiri konflik dan memulihkan hubungan kedua Negara, Thailand dan Kamboja berupaya untuk lebih mengembangkan hubungan mereka dengan menjalin hubungan kerjasama, salah satunya di bidang pariwisata (Intan, 2021). Thailand memahami bahwa pariwisata adalah potensi besar Negaranya yang dimiliki. Bidang pariwisata mempunyai keunggulan dalam hal aset atau sumber daya yang digunakan karena sebagian sumber daya pariwisata dapat digunakan berulang kali atau dapat diperbaharui. Thailand berniat untuk meningkatkan pendapatan Negara dan menjadikan dirinya sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berdaya saing dan berstandar internasional.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai Indonesia yang juga menengahi konflik ini, Indonesia juga terlibat dalam menangani konflik tersebut, sehingga kerjasama semacam ini dapat dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan potensi sektor pariwisata di setiap negara. Menurut Nurfadhilah (2017:10), tujuan kerjasama pariwisata ini adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan hubungan kedua negara, seperti dengan menerapkan single visa dan mengatur pertukaran pelajar bagi mahasiswa yang belajar D3 pariwisata. Selain itu, kunjungan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth ke Kamboja pada bulan Oktober 2014 menghasilkan sejumlah kolaborasi atau kerjasama pariwisata, yaitu promosi paket pariwisata bersama yang menghubungkan tempat wisata dari kedua negara. Lebih khusus lagi, Thailand dan Kamboja sepakat untuk bekerjasama menciptakan satu visa bagi kedua kerajaan tersebut. Perjanjian ini dikenal dengan pakta pariwisata "*Two Kingdoms, One Destination*" (Raymond, 2014).

Dalam hal ini, perekonomian Kamboja ditopang oleh empat pilar utama Negaranya, salah satunya adalah pariwisata. Menurut informasi terbaru pada periode pra-pandemi, Negara ini mencatat kedatangan 6,6 juta wisatawan asing pada tahun 2019, memperoleh pendapatan senilai 4,92 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp. 15.154) yang berkontribusi 12,1 persenter terhadap PDB (Pasaribu, 2023). Tingkat pemulihan pariwisata Kamboja pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 82,5 persen dari tingkat sebelum pandemic (Novita, 2024). Adapun dari Negara Thailand sendiri, seperti dilansir Reuters, 11,15 juta pengunjung asing mengunjungi Thailand pada tahun 2022, naik dari 428,000 pada

tahun sebelumnya, ketika pembatasan perjalanan terkait pandemi diberlakukan. Angka ini melampaui target pemerintah dan mencerminkan lingkaran kuat ketika Thailand berupaya menghidupkan kembali industri pariwisata yang penting, dan pada bulan Desember 2022, terdapat 2,24 juta wisatawan asing yang mengunjungi Thailand, sebuah lompatan besar dibandingkan dengan bulan Desember 2021 yang hanya berjumlah 230,497 wisatawan asing (CNN Indonesia, 2023). Ketika sektor pariwisata yang terus meningkat atau berkembang, Perdana Menteri Thailand percaya bahwa Negaranya memperkirakan lebih dari 30 juta wisatawan mancanegara atau asing akan mengunjungi Negara tersebut pada tahun 2023 (CNN Indonesia, 2023).

Hubungan antara Thailand dan Kamboja secara bertahap akan membaik berkat adanya kerjasama di bidang pariwisata. Dengan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan atau wawasan dan pengalaman, pertukaran pelajar antara pelajar Thailand dan Kamboja juga akan membantu berkembangnya persatuan antara kedua Negara (Nurfadhilah, 2017). Secara khusus, dalam tulisan ini juga membahas ataupun menjelaskan perkembangan pariwisata di kedua negara yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun kembali hubungan diplomatik antara Thailand dan Kamboja pasca konflik tersebut. Karena ini merupakan contoh dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja menarik peneliti untuk analisis.

Tujuan dari penelitian ini pun juga untuk melakukan atau mencari sudut pandang yang belum dipertimbangkan secara luas dengan menemukan sudut pandang atau teori baru untuk menemukan solusi atau pemahaman baru mengenai

akses terhadap wilayah lain dan sumber daya alam, maka wilayah perbatasan yang diperebutkan mempunyai banyak nilai strategis sehingga menimbulkan konflik berskala besar (Sitohang, et.al, 2021). Dalam hal ini pun, penulis tertarik meneliti dalam topik ini dikarenakan permasalahan atau konflik ini melibatkan dua Negara yang mempunyai sejarah yang panjang, yang berdampak pada dinamika politik, ekonomi, dan keamanan dikawasan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang ditemukan dalam konflik ini yaitu:

1. Terjadinya perebutan wilayah kuil yang belum selesai, dan saat Mahkamah Internasional memberikan hak wilayah Kuil Preah Vihear kepada Kamboja, Thailand tidak terima dengan keputusan tersebut kemudian konflik terus berlanjut dari tahun ke tahun.

1.3 Fokus Penelitian

Pada identifikasi masalah yang dituliskan, terjadinya sengketa wilayah ini disebabkan karena Negara Thailand menentang hak Negara Kamboja untuk kedaulatannya atas batas wilayah mereka dikarenakan letak kuil tersebut berbatasan antara Thailand dan Kamboja. Fokus penelitian pada pembahasan ini yaitu cara Negara Thailand dan Kamboja dalam menjalin kembali hubungan antar kedua Negara tersebut setelah adanya konflik sengketa pada tahun 2017-2024 dengan melalui *multi track diplomacy* sebagai instrumen penyelesaian konflik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu "Bagaimana *Multi Track Diplomacy* Thailand dan Kamboja sebagai instrumen dalam menjalin kembali hubungan setelah adanya konflik wilayah Kuil Preah Vihear?"

1.5 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dibahas dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *multi track diplomacy* Thailand dan Kamboja sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam menjalin setelah adanya konflik wilayah Kuil Preah Vihear.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah bacaan yang bermanfaat dan sebagai bahan masukan untuk peningkatan penelitian, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dalam menambah Ilmu pengetahuan Hubungan Internasional dan pengembangan teori serta konsep yang berkaitan dengan Sengketa Perbatasan, Teori *Multi Track Diplomacy*, juga menambah wawasan mengenai situasi konflik, sosial, maupun politik Thailand dan Kamboja dalam menyelesaikan konflik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian memiliki hubungan yang berkaitan dengan penulis dan pembaca. Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan dedikasi kepada pembaca mengenai pemahaman ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi siapapun guna sebagai alternatif solusi suatu permasalahan dalam menanggapi masalah yang diidentifikasi dalam konteks sosial, ekonomi, atau politik. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai permasalahan sengketa-sengketa yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan lainnya, seperti apa saja yang berdampak dari permasalahan atau konflik tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan agar sengketa tersebut dapat mencapai kesepatakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Walaupun penelitian ini berfokus pada sengketa perbatasan di wilayah Thailand dan Kamboja, tetapi juga dapat memberikan gambaran pada sengketa-sengketa lainnya yang terjadi di wilayah perbatasan di berbagai dunia. Bagi pembaca, memberikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam pengerjaan tugas yang berhubungan dengan permasalahan sengketa antar negara kepada pembaca. Dan juga berupaya untuk lebih memberikan perhatian mengenai sengketa perbatasan yang terjadi di wilayah Thailand dan Kamboja agar mengetahui perkembangan permasalahan tersebut.